

RPJMD Berkualitas untuk Pembangunan yang Jelas

Dalam bulan-bulan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar menyiapkan kewajiban konstitusional menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.



OLEH:

ARIF ARDIYANTO

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar

lanjutan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Begitu juga formula untuk masalah dan isu kekinian daerah yang dipotret dan diangkat oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk dituntaskan.

Tantangan lain penyusunan RPJMD adalah menyelaraskan dan mengintegrasikan program dan kegiatan dengan RPJP, RPJMN, dan RTRW. Bahkan dalam konteks pembangunan NKRI, RPJMD juga harus selaras dengan RPJMD provinsi tetangga sehingga pembangunan yang bersifat lintas sektoral dapat berjalan baik.

Dalam Musrenbangnas 2017, Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya karena program dan kegiatan tak fokus, terlalu banyak dan tidak terintegrasi. Akibatnya seperti yang beliau contohkan, ada pembangunan pelabuhan tetapi tidak ada atau terlambat pembangunan akses jalan menuju ke sana, juga tanpa kesiapan manajemen dan otoritas kepelabuhanan. Contoh lainnya, pembangunan pembangkit listrik tanpa jaringan.

Dari kegiatan seperti inilah kemudian muncul istilah aset mangkrak. Suatu hal yang tidak kita inginkan dalam pembangunan di Sulbar.

Program atau kegiatan yang tidak fokus di atas dapat terjadi karena rutinitas yaitu perencanaan tanpa prioritas program atau tanpa pemilahan urusan wajib dan pilihan, namun sifatnya hanya bagi rata atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) existing saat ini

Padahal perencanaan yang baik harusnya mempunyai karakter *money follows programs*. Tetapkan dulu program untuk mencapai target yang ingin dicapai, tetapkan fungsi, OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi, baru anggaran untuk program.

Di sinilah diperlukan keberanian mereformasi birokrasi dan menerapkan sistem pengendalian intern yang andal. Hal demikian telah ditekankan dalam Pasal 4 huruf d PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang menyatakan perlunya menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan berbasis kinerja dan menetapkan unit organisasi sesuai dengan kebutuhan.

Program dan kegiatan yang tepat juga memerlukan indikator jelas, *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound (SMART)* untuk menjamin keberhasilannya. Penjabaran indikator SMART harus pada terciptanya SPM, IKU, IKK yang tepat pada setiap program dan kegiatan atau pada penjabaran OPD yang melaksanakan.

Target pengentasan kemiskinan misalnya, harus dijabarkan pada program atau kegiatan yang sesuai, IKU dan IKK yang tepat dan kemudian breakdown pada OPD, sehingga ketika program atau kegiatan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, angka kemiskinan turun.

Ada tiga pelaku besar dalam pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. RPJMD berkualitas harus mampu memanfaatkan semua poten-

si tersebut. Dalam pemerintahan itu sendiri, Pemprov tidak berdiri sendiri. Ada pemerintah pusat, termasuk untuk urusan yang tidak didelegasikan kewenangannya kepada Pemprov, dan ada pemkab di wilayahnya.

Kemudian ada dunia usaha yang perlu disinergikan untuk menopang pencapaian target Pemprov. Dengan porsi APBD Provinsi yang < 10% dari PDRB Sulbar, sangat naif kalau ingin membangun Sulbar hanya bertumpu pada APBD Provinsi. Mengingat potensi alam dan kondisi geografis bersesuaian dengan Nawacita, perlu upaya keras meyakinkan pemerintah pusat menempatkan Proyek Strategis Nasional di Sulbar. Selain itu perlu kebijakan yang jelas terkait pengembangan wilayah di sektor perkebunan, industri, atau pariwisata untuk menarik proyek pemerintah lainnya dan investasi dunia usaha.

Kemudian, jauh lebih penting adalah peran masyarakat. Untuk melipatgandakan hasil, pembangunan daerah perlu diarahkan pada program yang menstimulasi pemberdayaan, kreativitas, produktivitas, kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan efek resiprokal terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RPJMD yang baik seharusnya juga memberi arah terciptanya *good governance* dan *clean government*. Sebagai unsur pelaksana, penyelenggara pemerintahan daerah didorong untuk menjalankan praktik *good governance*

diantaranya melalui transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Adapun perwujudan *clean government* adalah dalam bentuk program dan kegiatan yang mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memberi ruang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Karenanya, program dan rencana kerja harus tepat, sesuai kebutuhan dan prioritas sehingga menjadi RPJMD yang pro pencegahan korupsi.

Sebagai informasi tambahan, sejak tahun 2012 KPK telah menggandeng BPKP dalam kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi dalam pengelolaan APBD, pengadaan Barang/Jasa, dan pelayanan publik. Mulai tahun 2016, kegiatan Korsupgah Korupsi difokuskan pada perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyusun RPJMD bar 2017-2022 yang berkualitas dengan minimal memenuhi kriteria di atas dibutuhkan komitmen bersama para pihak agar sungguh-sungguh menuangkan garis kebijakan, strategi, aksi, gagasan, inovasi, dan prioritas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk kesejahteraan rakyat.

RPJMD yang member garis kebijakan jelas, informasi update dan akurat, akan menjadi arah dalam perencanaan dan pembangunan pada OPD yang menjadi ujung tombak pembangunan. Semoga RPJMD berkualitas, Sulbar maju dan *Malaqbiq* dapat segera terwujud. (***)